

Penanganan Konflik Ambon dalam Analisis *Dialektics Peace-Reconciliation* dari Bar- Siman-Tov

St. Shofiyah¹, Hafied Cangara²

¹Universitas Indonesia Timur, Makassar

²Universitasa Hasanuddin, Makassar

e-mail: sofi.ghani@yahoo.com

e-mail: cangara_hafied@yahoo.com

Abstract

The concept of conflict management often focuses only on how to stop the conflict. However, how to prevent these conflicts from happening again, and how to maintain permanent peace, often escapes scientific studies and the attention of conflict theorists and parties concerned with world peace. Based on this phenomenon, Bar-Siman-Tov developed a theory regarding the creation of lasting peace (stable peace) through a dialectic between the "peace approach" (top down structural) and the "reconciliation approach" (bottom up social psychological). The research is aimed at analyzing the Ambon conflict using the Bar-Siman-Tov theory. The Ambon conflict is a big story in the history of the Indonesian nation. Maluku City, known as a peaceful region with all its plurality, was tested in 1999-2002 by a major conflict. The method used is the library method by collecting data through various written sources. The results of the study show that the dialectic of a structural "peace approach" with grassroots "reconciliation approach" is capable of creating stable peace.

Keywords: dialectics; peace; reconciliation; stable peace

Abstrak

Konsep penanganan konflik sering kali hanya berfokus pada bagaimana menghentikan konflik tersebut. Namun, tentang bagaimana menjaga agar konflik tersebut tidak lagi terjadi, serta bagaimana memelihara perdamaian yang permanen, seringkali luput dari kajian-kajian ilmiah dan juga luput dari perhatian para teoritis konflik maupun dari para pihak-pihak yang selama ini konsern dengan perdamaian dunia. Berdasarkan fenomena ini, Bar-Siman-Tov mengembangkan teori mengenai penciptaan perdamaian yang abadi (*stable peace*) melalui dialektika antara “pendekatan perdamaian” (struktural yang top down) dengan “pendekatan rekonsiliasi” (sosial psikologis yang bottom up). Penelitian ditujukan untuk menganalisis konflik Ambon dengan menggunakan teori Bar-Siman-Tov ini. Konflik Ambon adalah kisah besar dalam jalannya sejarah bangsa Indonesia. Maluku yang selama ini dikenal sebagai wilayah yang damai dengan segala pluralitasnya kemudian tahun 1999-2002 diuji dengan konflik yang besar. Metode yang digunakan adalah metode Pustaka dengan mengumpulkan data melalui berbagai sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan dialektika “pendekatan perdamaian” yang struktural dengan “pendekatan rekonsiliasi” yang akar rumput mampu mewujudkan perdamaian yang stabil (*stable peace*).

Kata kunci: dialektika ; perdamaian; rekonsiliasi; *stable peace*

A. Pendahuluan

Sebagian besar studi tentang resolusi konflik dan perdamaian lebih berkonsentrasi pada penyebab konflik serta bagaimana menciptakan kondisi dari perang ke perdamaian. Kajian mengenai kondisi apa yang diperlukan untuk pemeliharaan dan konsolidasi perdamaian setelah resolusi konflik, masih sangat kurang. Meskipun resolusi konflik mengarah pada penghentian konflik secara formal ketika kesepakatan damai telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak yang berkonflik, hal itu tidak serta merta menstabilkan, menormalkan, atau mengkonsolidasikan hubungan perdamaian baru atau bahkan mencegah perkembangan konflik baru di masa depan. yang dapat menimbulkan kekerasan baru (Burton, Fisher, Kries berg, dan Bar-Tal dalam Bar-Simon-Tov, 2004).

Bahkan ketika pihak-pihak yang berkonflik berkepanjangan berhasil menyelesaikan konflik mereka, dan terutama yang menyangkut wilayah, batas, sumber daya, atau kedaulatan, terkadang mereka gagal memuaskan satu atau kedua belah pihak atau mengatasi kepahitan dan keluhan yang melekat dalam konflik yang berkepanjangan, atau persepsi permusuhan dan ketakutan bersama mereka. Akibatnya, mereka mungkin merasa sulit jika bukan tidak mungkin untuk menormalkan dan menghangatkan hubungan perdamaian, yang tetap minim, dingin, dan terbatas pada kerja sama politik dan keamanan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian. Mencapai formula politik untuk menyelesaikan konflik kepentingan diperlukan tetapi tidak cukup untuk mengatasi hambatan politik dan psikologis yang dapat

menggagalkan normalisasi dan stabilisasi hubungan perdamaian (Kriesberg, 1998a; Kelman, 1999a; Rothstein, 1999b, 1999c; Bar-Tal, 2000b dalam Bar-Simon-Tov, 2004). Setelah perdamaian tercapai, pertanyaannya adalah apakah perdamaian dipertahankan dan distabilkan serta kondisi apa yang diperlukan, memadai, dan menguntungkan untuk pemeliharaan dan konsolidasi perdamaian?

Konflik Ambon, sebagai salah satu tragedi kemanusiaan besar dalam perjalanan sejarah Indonesia pun mengalami perjalanan penyelesaian konflik yang cukup berliku. Konflik di Ambon sering digambarkan sebagai permusuhan lama antara umat Muslim dan Kristen, walaupun keadaannya lebih kompleks. Konflik ini dipandang sebagai salah satu konflik yang paling dahsyat, dari sejumlah konflik yang pecah setelah kejatuhan rezim Soeharto. Konflik tersebut merenggut hampir 5.000 nyawa dari tahun 1999 sampai 2002 dan mengungsikan sepertiga dari penduduk Maluku dan Maluku Utara. (Indrawan & Tania, 2022).

Melacak sumber-sumber konflik vertikal dan konflik kekerasan sosial horizontal di Indonesia, seperti, sejarah konflik sosial di Ambon tidak lepas dari kondisi politik bangsa. Menurut Bertrand, krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sampai dengan bulan Mei 1988, telah memancing gejolak sosial dan bias destruktif di dalam negeri. Kondisi ini menjadi sebuah momentum bagi kelompok sosial yang marginal selama tiga puluh dua tahun dan gerakan sentimen politik partai oposisi terhadap otoritas Orde Baru. Kelompok ini bangkit secara serentak menyusup ke dalam barisan reformasi dan melakukan demonstrasi di luar mekanisme

demokrasi untuk meminta pertanggungjawaban politik kepala negara (Tidore, 2020).

Ketika pergerakan reformasi berhasil mendorong pergantian kepemimpinan nasional, berbagai saluran aspirasi yang semula terasa tersumbat, muncullah kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat yang semula terasa marginal, mulai berfungsi dan berperan kembali dengan berbagai cara agar bisa ikut memberi kontribusi bagi pembentukan tatanan sosial politik Indonesia yang baru pasca reformasi. Namun ketiadaan platform perubahan dalam kerangka reformasi, pada kenyataannya berdampak negatif terhadap tatanan sosial yang diindikasikan oleh instabilitas politik sejak krisis ekonomi hingga reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Inilah dinamika dimulainya perubahan politik dan sosial di Indonesia, dimana sejumlah harapan akan terjadi, baik di bidang ekonomi maupun reformasi di bidang politik dalam mewujudkan stabilitas demokratisasi yang permanen dan signifikan (Tidore, 2020).

Pemicu konflik di Ambon adalah peristiwa pada 19 Januari 1999 selama liburan hari raya Muslim, Idul Fitri. Sebuah perselisihan kecil terjadi antara seorang pemuda Kristen dari Mardika, kabupaten di kota Ambon, dengan seorang pemuda Muslim dari Batumerah, sebuah desa di sebelah Mardika. Desas-desus yang memperburuk perpecahan yang sudah ada antara komunitas Kristen dan Muslim dimulai, mempengaruhi desa-desa di sekelilingnya ke dalam kekerasan. Pada awalnya, perkelahian hanya terjadi antara orang Kristen Ambon dan pendatang Muslim dari Sulawesi Selatan (Bugis, Buton dan Makassar), dengan

masing-masing meluncurkan serangan mendadak terhadap yang lain. Konflik diakhiri dengan kesepakatan damai warga Halmahera sejak Agustus 2000 dan mereka mulai saling berhubungan (Indrawan & Tania, 2022).

Penelitian dengan basis kepustakaan ini, mencoba menguji teori Bar-Siman-Tav mengenai dialektika antara perdamaian dan rekonsiliasi dalam menciptakan perdamaian permanen (*stable peace*) di wilayah konflik Ambon. Konsep perdamaian dalam teori Bar-Siman-Tav merujuk pada penanganan konflik secara struktural yang diprakarsai oleh pemerintah (*top down*) sementara konsep rekonsiliasi, oleh Bar-Siman_Tav, dimaknai sebagai proses penyelesaian konflik melalui dengan inisiasi dari akar rumput (*bottom up*).

Jadi, penelitian ini bertujuan menganalisis penetrasi konsep Bar-Siman-Tov mengenai dialektika antara perdamaian dan rekonsiliasi dalam menciptakan perdamaian yang stabil (*stable peace*) pada pasca konflik Ambon.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kepustakaan. Metode ini dipandang relevan untuk studi ini. Melalui rujukan-rujukan literatur, kita akan mendapatkan atau memetakan sejumlah upaya-upaya perdamaian dan rekonsiliasi yang telah dijalankan selama periode penyelesaian konflik tersebut. Sumber untuk kajian ini didapatkan dari berbagai macam sumber. Ada yang dari buku, jurnal-jurnal yang telah terbit sebelumnya, serta bahkan akan diperoleh melalui koran dan majalah.

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui mekanisme mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola melalui proses reduksi data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan dalam riset ini. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Peneliti menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk paparan deskriptif naratif agar dapat dipahami. Tahap terakhir, yakni penyimpulan data. Penarikan kesimpulan dimulai ketika penulis sudah menganalisis data serta mengamati fenomena yang ada. Data yang telah diperoleh kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif yakni proses penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum agar dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat objektif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Teori *Dialektics Peace-Reconciliation* dari Bar-Siman-Tov

Pemahaman yang lebih baik tentang masalah pemeliharaan dan konsolidasi perdamaian memerlukan kombinasi teori hubungan internasional dan psikologi social. Perdamaian yang stabil (*satbe peace*) hanya dapat dibangun ketika pihak-pihak dalam perjanjian perdamaian puas dengan perjanjian perdamaian dan setelah kondisi institusional struktural, kognitif, dan emosional yang mendasari konflik yang berkepanjangan telah diubah menjadi kepuasan bersama dari pihak-pihak yang terlibat melalui proses pembelajaran dan rekonsiliasi.

Kondisi yang dibutuhkan untuk perdamaian dan

rekonsiliasi yang stabil jelas saling melengkapi, terutama kondisi struktural-institusional. Oleh karena itu, kerangka bersama yang memadukan kondisi struktural-institusional, khususnya interaksi dan kerja sama tingkat tinggi, institusi dan organisasi Bersama dan pembelajaran sosial dengan perubahan kognitif-emosional dasar, jelas dibutuhkan.

Pemeliharaan dan konsolidasi perdamaian membutuhkan kedua jenis kondisi tersebut. Hanya hubungan timbal balik mereka yang dapat menjamin perdamaian yang panjang dan positif. Namun demikian, dua pertanyaan penting dalam hal ini: Apakah mungkin untuk menjalankan kedua rangkaian kondisi ini secara bersamaan? Alternatifnya, jika ini tidak mungkin, rangkaian kondisi apa yang merupakan prasyarat untuk mendorong rangkaian kondisi lainnya? Masing-masing pihak harus menginternalisasi fakta bahwa hanya hubungan perdamaian yang menggabungkan kerja sama yang luas dan perubahan psikologis yang dapat mempertahankan dan mengkonsolidasikan perdamaian.

Oleh karena itu, lebih mudah untuk memelihara dan mengkonsolidasikan interaksi dan kerjasama awal serta membentuk lembaga dan organisasi bersama. Implementasi beberapa tindakan struktural institusional dapat mendorong para pihak untuk mendukung perdamaian dan memulai perubahan psikologis berikutnya.

Seseorang dapat menyimpulkan bahwa kondisi struktural-institusional dapat berfungsi sebagai prasyarat yang diperlukan untuk rekonsiliasi. Manfaat politik dan keamanan dari perdamaian

merupakan prasyarat bagi perkembangan perdamaian dan rekonsiliasi yang stabil. Membangun mekanisme struktural-institusional yang diterima bersama untuk pencegahan kekerasan dan pengelolaan konflik secara damai, serta mengembangkan langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan lainnya, dapat mengurangi persepsi ancaman dan perasaan takut. Manfaat ekonomi dari hubungan perdamaian adalah alat yang ampuh dalam mendorong investasi sosial dalam pembangunan perdamaian karena anggota masyarakat melihat bahwa adalah kepentingan mereka sendiri untuk mendukung proses perdamaian dengan memelihara dan mengkonsolidasikan perdamaian. Hanya ketika kedua belah pihak menyadari bahwa hubungan damai memang bermanfaat karena mereka tidak hanya menyediakan kebutuhan keamanan tetapi juga keuntungan ekonomi barulah mereka menginternalisasi nilai perdamaian ke dalam keamanan dan kekayaan mereka dan dengan demikian menjadi matang untuk rekonsiliasi.

Bar-Siman-Tov mengutip pendapat Adler dan Barnett, berpendapat bahwa penyelesaian awal dari beberapa kondisi struktural-institusional diperlukan untuk memajukan gagasan keamanan bersama. Mereka membedakan antara tiga fase dalam pengembangan keamanan bersama: fase *nascent*, *ascendant*, dan *mature*. Pada fase *nascent*, kedua belah pihak belum matang untuk membangun keamanan bersama tetapi mereka tertarik untuk menstabilkan hubungan keamanan mereka, menurunkan biaya transaksi yang terkait dengan pertukaran mereka, dan mendorong pertukaran dan interaksi lebih lanjut. Jika tidak ada kepercayaan,

para pihak akan membentuk organisasi dan institusi untuk mengamati dan memverifikasi perjanjian damai untuk mencegah pelanggarannya.

Fase *ascendant*, ditandai dengan peningkatan jumlah institusi dan organisasi baru, koordinasi dan kerjasama militer yang lebih erat, pendalaman rasa saling percaya, perluasan dan intensifikasi interaksi dan transaksi, dan munculnya identitas kolektif yang mulai mendorong harapan yang dapat diandalkan dari perubahan damai. Perkembangan ini didorong oleh pembelajaran sosial, yang meningkatkan pengetahuan bahwa kondisi keseluruhan masing-masing pihak akan sangat meningkat hanya dengan pengembangan komunitas keamanan. Dimasukkannya pembelajaran sosial dalam tahap kedua ini menarik karena hanya muncul setelah dan sebagai hasil dari langkah pertama interaksi dan transaksi, serta setelah pembentukan lembaga dan atau organisasi bersama yang pertama. Oleh karena itu kedua belah pihak menyadari bahwa hubungan damai itu bermanfaat dan hanya dengan memperdalam kerja sama dan pembentukan identitas kolektif mereka dapat memperbaiki situasi mereka secara keseluruhan, tetapi realisasi ini membutuhkan perubahan mendasar dari kepercayaan masyarakat. Hanya perubahan seperti itu yang menunjukkan bahwa pembelajaran sosial telah terjadi. Pembelajaran sosial pada gilirannya memperdalam rasa saling percaya dan memajukan momentum menuju komunitas keamanan.

Selama fase *mature* harapan yang dapat diandalkan dilembagakan baik dalam pengaturan domestik maupun

supranasional. Pada tahap ini aktor daerah berbagi identitas, dan komunitas keamanan muncul.

Asumsi bahwa interaksi dan kerja sama didahulukan dan dapat berfungsi sebagai prasyarat untuk rekonsiliasi tampaknya masuk akal. Namun, ada asumsi yang berbeda bahwa proses untuk perdamaian atau rekonsiliasi yang stabil harus dimulai dengan mengubah sikap dan keyakinan dan diikuti dengan kerja sama. Alasan untuk asumsi ini adalah bahwa interaksi dan kerjasama yang luas, serta pembentukan lembaga dan organisasi bersama, merupakan ungkapan perdamaian yang hangat dan normal, dan ini hanya mungkin terjadi setelah rekonsiliasi.

Tanpa perubahan kognitif dan emosional timbal balik, salah satu atau kedua belah pihak akan menolak untuk menghangatkan dan menormalkan hubungan damai. Dengan kata lain, perubahan psikologis adalah prasyarat untuk memelihara dan memantapkan hubungan damai, dan perdamaian yang stabil (*stable peace*) hanya mungkin setelah tercapainya rekonsiliasi timbal balik. Argumen semacam ini telah dilontarkan oleh Mesir sejak penandatanganan perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Mesir berpendapat bahwa tanpa rekonsiliasi sejati, tidak akan menghangatkan dan menormalkan hubungan perdamaian dengan Israel. Memang, dengan tidak adanya rekonsiliasi sejati, hubungan perdamaian Israel-Mesir tetap dingin dan gagal menuju perdamaian yang stabil (Bar-Siman-Tov, 2004).

Pemeriksaan terhadap dua rangkaian kondisi tersebut menunjukkan bahwa kombinasi kondisi struktural-institusional dan perubahan kognitif paling baik menjelaskan bagaimana

mengembangkan perdamaian yang stabil. Pembelajaran sosial mungkin merupakan sarana yang diperlukan untuk perubahan kepercayaan masyarakat; namun, pembelajaran yang strategis atau kompleks di antara para pembuat keputusan diperlukan untuk stabilisasi awal hubungan perdamaian, terutama karena para pembuat keputusan adalah agen yang memicu munculnya proses pembelajaran sosial. Biasanya diasumsikan bahwa perubahan psikologis atau kepercayaan masyarakat perubahan adalah persyaratan yang lebih sulit daripada perubahan struktural-institusional awal, tetapi tampaknya proses menuju perdamaian atau rekonsiliasi yang stabil umumnya dimulai dengan beberapa perubahan struktural-institusional.

Jadi intinya, Bar-Siman-Tov menyatakan bahwa *stable peace* akan bisa dicapai melalui dialektika antara pendekatan struktural yang top down (yang oleh Bar-Siman_Tov diistilahkan dengan kata “perdamaian”) dengan pendekatan sosiologis-psikologis yang bottom up (yang oleh Bar-Siman_Tov diistilahkan dengan kata “rekonsiliasi”).

1. Penerapan Dialektika *Peace* dan *Reconciliation*

a. Pendekatan Struktural (*Peace*).

Beberapa langkah telah ditempuh dalam melalui pendekatan ini, diantaranya adalah;

Pembentukan Pusat Rujuk Sosial (PRS)

Tim terpadu PRS ini dibentuk oleh Gubernur pada Maret 1999 dan dibawah kordinasi langsung Wakil Gubernur Maluku Bidang Kesra (AKB Pol. Dra Ny. Paula Renyaan),

terdiri dari para tokoh lintas agama, seperti: Ketua MUI Maluku. H. R. Hassanusi, Ketua Sinode GPM, Pendeta Semy Titaley, Ketua Keuskupan Amboyna, M.C. Mandagi, dan Kakanwil Agama Maluku, Drs. H. Hasyim Marasabesy, SH, serta Raja-Latupati yang diwakili oleh Raja Batu Merah, H. Latif Hatala (Islam) dan Raja Passo Ny. Theresia Maitimu (Kristen), serta tokoh pemuda lainnya yang representatif. Tujuan pembentukan Tim PRS ini berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dan aparat TNI-Polri secara bersama melakukan sosialisasi penghentian konflik dan membangun damai yang lebih permanen. Kebijakan Gubernur Maluku dan pendekatan top-down pemerintah ini menurut Rustam Kastor disebabkan pengalaman gagalnya perdamaian yang dibangun masa lalu. Kastor, tokoh Maluku yang juga mantan Kasdam Trikora Jayapura secara tegas menyatakan:

Tim-19 ABRI Putra Asal Maluku

Tim-19 ABRI berangkat ke Ambon pada tanggal 9 Maret 1999 atas inisiatif Pangdam Wirabuana Makassar Mayjen TNI Suwaedi Marasabessy sebagai ketua Tim khusus-19 ABRI terdiri dari putra terbaik asal Maluku langsung terjun ke Ambon, melakukan tatap muka secara top-down dengan tim rekonsiliasi di Ambon untuk berdialog dan dicapai kesepakatan, menghentikan pertikaian, dan Ibnu Mujib, Yance Z. Rumahuru, Paradigma Transformasi Masyarakat Dialog.

Insistif Gubernur Maluku bersama Tokoh Agama

Pendekatan pemerintah Daerah bersama pimpinan umat beragama, tokoh masyarakat dan Raja-Latupati, tokoh pemuda, serta pimpinan paguyuban menandatangani ikrar perdamaian di Lapangan Merdeka Ambon pada tanggal 12 Mei 1999. Mereka sepakat mengakhiri tragedy kemanusiaan yang telah menghancurkan kehidupan anak negeri dan tatanan hidup sosial kearifan umat beragama, berbangsa dan bernegara. Tujuan ikrar damai itu menunjukkan semua komponen lintas agama sungguh menyesali semua pengalaman pahit konflik yang memilukan. Tekad bersama mereka untuk kembali membangun hubungan peladong bagi kehidupan bersama yang didasari rasa cinta, kasih, sejahtera, saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan nilai teologis ajaran agama yang dianut.

Insiatif Kapolri

Kepala Polri Jenderal (Pol) Rusmanhadi pada tanggal 3 Desember 1999 bertemu sekitar 60 orang masyarakat asal Ambon-Maluku yang berdomisili di Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan rencana memebentuk Satua Tugas (Satgas) Perdamaian Ambon yang akan dikiriom ke Maluku dalam waktu dekat. Menurutnya, bahwa konflik pertikaian di Ambon hanya bisa diselesaikan oleh masyarakat Ambon sendiri, siapapun yang menjaga keamanan di Ambon tidak akan berhasil, jika masyarakat Ambon yang bertikai tidak mampu menyelesaikan masalahnya.

Rekonsiliasi di KRI TNI AL

Pada tanggal 24 April 2000 pemerintah melakukan rujuk sosial bersama para elit lokal, tokoh agama, Raja-Raja, dan Latupati se-Maluku berjumlah 900 orang di atas KRI Multatuli dan KRI Arum milik TNI AL di perairan Ambon-Maluku. Rekonsiliasi para tokoh yang representatif melalui rujuk sosial ini diharapkan dapat mengembalikan tatanan sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun keagamaan di Maluku telah porak-poranda akibat pertikaian antarkedua kelompok umat beragama.

Kepres Pemberlakuan Darurat Sipil

Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan pemberlakuan keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Maluku Utara dengan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2000 tanggal 26 Juni 2000 pukul 00.00 Waktu Indonesia Timur (WIT), telah berlangsung selama 18 bulan. Model pendekatan negara bersifat top-down ini, maka Gubernur Maluku selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDS) memiliki berbagai kewenangan untuk melakukan tindakan dalam rangka penghentian pertikaian atau konflik. PDS dengan kewenangan yang dimiliki telah menyusun program kerja dan petunjuk pelaksanaannya secara periodik setiap 3 bulan sebagai pedoman dan acuan bagi unsur-unsur pelaksana guna menghentikan konflik dan membangun perdamaian di Maluku.

Segregasi Wilayah

Segregasi yang dilakukan pemerintah dengan membagi wilayah untuk warga nasrani dan wilayah untuk warga muslim. Meskipun segregasi ini sejatinya seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak terencana. Segregasi yang terbentuk pasca-konflik 1999 dapat dikatakan merupakan konsekuensi yang tak terencana (*unintended consequence*) dari kebijakan relokasi pemerintah untuk menangani pengungsi pasca-konflik.

Secara umum, tumbuhnya segregasi pasca-konflik terkait erat dengan proses relokasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Pada saat konflik Ambon meletus banyak warga dari komunitas Islam dan Kristen mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman. Setelah konflik mereda, berbagai tempat menjadi konsentrasi para pengungsi, seperti sekolah, masjid, gereja, Wisma Atlet Ambon, dan sebagainya (Ansori, dkk, 2014).

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah solutif untuk penangan konflik. Meskipun demikian, sejumlah literatur memaparkan bahwa pada dasarnya pemerintah telah gagal mengakomodasi aspirasi kedua belah pihak yang berkonflik.

Bahkan temuan dari tim The Habibie Centre mengungkap sisi lain dari keberadaan pihak keamanan. Tuduhan atas keterlibatan aparat dalam menyulut kekerasan cukup tersebar di antara anggota masyarakat dan memiliki sejarah Panjang dalam dinamika konflik di Ambon. Beberapa studi akademis menunjukkan bahwa aparat keamanan dari kedua komunitas diindikasikan terlibat dan/atau memainkan peran tertentu dalam memperkeruh konflik komunal tersebut (Ansori, 2014).

Segregasi Pemukiman telah menciptakan sekat-sekat pemisah, pada setiap komunitas memunculkan stigma negatif terhadap orang-orang yang berada di luar kelompoknya. Bagi Muslim akan menganggap orang-orang non Muslim (Nasrani) sebagai orang lain atau "the other", demikian sebaliknya, dan kalau sudah kenyataannya seperti itu, berarti sudah ada ketegangan sosial yang bisa mengarah ke konflik (Ismail, 2017).

Kecenderungan yang terjadi di Ambon adalah sejalan dengan yang terjadi di dunia internasional, dimana komisi kebenaran dan penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia, pengampunan dan amnesti seringkali gagal sebagai sarana rekonsiliasi. Sumber daya terbesar untuk mempertahankan perdamaian dalam jangka panjang selalu berakar pada masyarakat lokal dan budaya mereka. Faktor waktu sangat penting dan prasyarat penting untuk rekonsiliasi berdasarkan transformasi budaya dan identitas kolektif (Lederach dalam Bräuchler, 2009). Hal sejalan dikemukakan oleh Bar-Tal dan Bennink (2004) bahwa perjanjian di atas kertas atau perdamaian di level atas biasanya gagal membangun hubungan damai yang sejati antara kedua belah pihak yang berkonflik karena hanya melibatkan dan menyentuh lapisan elit pemimpin mereka, sementara lapisan bawah mungkin tidak menerima permufakatan lapisan elit tersebut.

Kompromi mereka mungkin membantu menghentikan kekerasan dan berfungsi sebagai pintu masuk untuk inisiatif lain tetapi mereka biasanya gagal menyentuh akar penyebab dan perubahan struktural yang diperlukan untuk mengatasinya. mereka tidak melibatkan masyarakat luas dan juga tidak berurusan dengan

proses penting kepercayaan dan pembangunan (kembali) hubungan, yaitu proses penyembuhan masyarakat, dan dimensi budayanya (Bräuchler, 2009).

Menjawab kenyataan sejumlah pengamat mengenai kegagalan pemerintah menyentuh lapisan bawah dalam penanganan konflik Ambon, konsep Bar-Siman-Tov sejatinya bisa menjawab fakta ini. Menurutnya, memang dibutuhkan kerja sama antara pendekatan struktural (elit atas) dan pendekatan sosio-psikologis (lapisan akar rumput) untuk berdialektika dengan pendekatan yang lainnya.

b. Pendekatan Sosio-Psikologis (*bottom up*)

Di tingkat bawah, inisiasi rekonsiliasi berjalan sangat aktif. Sejumlah sumber daya diberdayakan untuk mewujudkannya, baik berdasarkan wilayah, maupun berdasarkan kelompok-kelompok social yang ada di Ambon. Usaha mewujudkan perdamaian abadi bergerak, baik secara spontan pada level individu, maupun pada level yang lebih besar yang terencana.

Peran para tokoh masyarakat

Peran tokoh masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, raja-raja, serta Latupatti sebagai tokoh yang representatif dari kelompok pejuang. Fatwa dan suara kelompok ini lebih didengar oleh kelompok masyarakat sipil moderat (civil society) dan berhasil menghentikan kekerasan konflik. Sikap tegas kelompok ini menurut Klinken, mereka menghendaki agar pemerintah sebagai kuasa negara melakukan lobi-lobi bottom-up walaupun melalui berbagai saluran yang rumit, yaitu lebih prioritas pada pendekatan penegakan supermasi hukum, mengusut tuntas

peristiwa 19 Januari 1999, membongkar konspirasi politik organisasi laten, pendasain konflik, menuju tahapan resolusi konflik Ambon. Jika opsi ini tidak diakomodir dan mendapat respon pemerintah, maka sangat berdampak terhadap proses penyelesaian konflik karena menjadi bias penolakan lebih keras dari posisi ulama penyambung suara umat dan kuasa rakyat dari kelompok civil society menolak perdamaian (Tidore, 2020).

Pengarusutamaan Pendidikan

Pengarusutamaan pendidikan perdamaian (*peace education*) berbasis kearifan lokal Pela Gandong dilaksanakan di sejumlah Lembaga pendidikan. Pada 25-30 Januari 2018, lembaga UNDP bersama lembaga nasional dan lokal Maluku seperti Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan ARMC IAIN Ambon mengadakan kegiatan *Interfaith Youth Camp* 2018 di Ambon Maluku. Satu di antara agendanya, pada 29 Januari 2018, yakni, melihat bagaimana dua sekolah yang mewakili kelompok agama saat konflik Ambon terjadi mengadakan ikatan persaudaraan yang disebut *panas pela*. Kegiatan panas pela pendidikan bertujuan semakin mempererat hubungan persaudaraan di kalangan siswa antar kedua sekolah tersebut yang berlatar belakang mayoritas bergama Islam dan Kristen. SMP Negeri 9 Ambon memiliki jumlah peserta didik 1431 jiwa dengan 99 % beragama Kristen, sedangkan SMP Negeri 4 Salahatu memiliki jumlah peserta didik 414 jiwa dengan 100 % beragama Islam. Berbagai atraksi budaya ditampilkan peserta didik kedua sekolah baik lewat tari, lagu, maupun puisi, yang semuanya mengarah dan mengajak peserta didik satu dengan yang lain untuk hidup saling menyayangi

walaupun berbeda agama suku dan golongan. Hubungan baik antar peserta didik dan guru di kedua sekolah berjalan harmonis dan makin rukun. Hampir tiap tahun, kedua sekolah ini melakukan 'reuni' yang dalam istilah adat disebut panas pela. Pela gandong pun bertransmisi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), kedua universitas beda ideologi agama ini mengangkat sumpah bersaudara dalam dunia pendidikan. (Hasudungan, Sariyatun, & Joebagio, 2020).

Pendidikan merupakan salah satu metode yang paling penting untuk mempromosikan rekonsiliasi. Penggunaan sistem sekolah untuk pendidikan perdamaian (*peace education*) seringkali merupakan satu-satunya institusi yang dapat digunakan secara formal, disengaja, dan ekstensif oleh masyarakat untuk mengubah repertoar psikologis anggota masyarakat. Pendidikan perdamaian bertujuan membangun pandangan dunia siswa (yaitu, nilai-nilai, keyakinan, sikap, motivasi, keterampilan, dan pola perilaku mereka) dengan cara yang mencerminkan realitas proses perdamaian dan mempersiapkan mereka untuk hidup di era perdamaian. dan rekonsiliasi. Ini berarti sistem sekolah harus membekali siswa dengan pengetahuan yang sesuai dengan rekonsiliasi (misalnya, tentang kelompok lain, jalannya konflik, hubungan damai di masa depan, sifat perdamaian, dan resolusi konflik). Selain itu, pendidikan perdamaian harus bertujuan untuk mengembangkan sikap dan keterampilan baru di kalangan siswa, diantaranya; toleransi, pengendalian diri, kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, empati, berpikir kritis, dan keterbukaan (Bar-Tal & Bennink, 2004).

Rekonsiliasi Antar Warga

Masyarakat Desa Wayame dengan latar belakang budaya yang berbeda berhasil membangun kedamaian di tengah konflik sosial yang bernuansa agama di Kota Ambon. Masyarakat Desa Wayame membangun sendiri rekonsiliasi lokal dalam mencegah konflik antar kelompok. Rekonsiliasi ini berasal dari masyarakat sendiri atas kesadaran dari masing-masing kelompok bukan berasal dari luar desa atau pihak ketiga. Para pemuka pendapat yang ada di Desa Wayame membentuk suatu kelompok yang disebut TIM 20, yang terdiri dari 10 orang anggota yang beragama Islam dan 10 orang anggota yang beragama Kristen. Masyarakat Desa Wayame secara tidak langsung memiliki hubungan emosional dengan kelompoknya yang terlibat konflik horizontal di sekitar Desa Wayame ataupun di Kota Ambon. Dengan terbentuknya TIM 20, masalah keamanan dan kedamaian masyarakat Wayame diserahkan kepada TIM 20 dengan dukungan masyarakatnya.

Tim ini bertanggung jawab atas pemeliharaan stabilitas sosial dan keamanan di dalam Desa Wayame. Tugas dan tanggung jawab inilah yang melatarbelakangi interaksi Tim 20 dengan masyarakat Wayame. Dari awal peng gagasan untuk membentuk TIM 20, sudah ada kerjasama dengan masyarakat dengan mengundang mereka pada saat Tim 20 dikukuhkan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Salah satu usaha, adalah melakukan koordinasi dengan dengan desa-desa tetangga tentang pentingnya membangun perdamaian. Desa-desa yang diajak untuk melakukan perdamaian, adalah dengan desa Hative Besar dan Dusun Kota

Jawa, bahkan sampai ke Jazirah Leihitu. Semua dilakukan atas pertimbangan stabilitas keamanan dan kedamaian yang terjaga dan terpelihara di Desa Wayame, apabila desa-desa tetangga merasakan kondisi yang keamanan dan kedamaian yang sama dengan Desa Wayame (La Jaali, Cangara, & Hasrullah, 2013).

Kesimpulan

Pendekatan struktural top down (yang distilahkan Bar-Siman-Tov dengan perdamaian) sepertinya tidak menghasilkan kondisi yang diharapkan dengan masih banyaknya ketidakpuasan di kedua belah pihak yang berkonflik. Kelompok Islam menganggap pihak TNI berpihak kepada kelompok Kristen, sementara pihak Kristen menganggap polisi berpihak kepada kelompok Islam. Segregasi wilayah justru membuat kedua kelompok semakin terpisah dan luka-luka psikologis kognitif tetap saja masih terbuka antar kedua belah pihak. Meskipun demikian bukan berarti pendekatan struktural ini tidak memberi manfaat. Sebagaimana yang dikemukakan Bar-Siman-Tov, pendekatan struktural di Ambon mampu menghentikan konflik fisik. Terhentinya konflik fisik akhirnya memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk menata psikologis kognitif yang kemudian membawa kepada rekonsiliasi. Selanjutnya rekonsiliasi di tingkat bawah mampu menciptakan kognisi yang sama kemudian menciptakan situasi yang lebih tenang dan akhirnya memberi peluang bagi pemerintah mengambil langkah-langkah baru berikutnya. Inilah yang oleh Bar-Siman-Tov disebut dialektika perdamaian-rekonsiliasi, dialektika top down-bottom up.

Daftar Pustaka

- Ansori, Mohammad Hasan., Sukandar, Rudi., Peranto, Sopar., Karib, Fathun., Cholid, Sofyan., & Rasyid, Imron. (2014). Segregasi , Kekerasan, dan KebijakanRekonstruksi Pasca Konflik di Ambon: Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Tim SNP-K-THC. Jakarta: SNP-K-THC.
- Bar-Siman-Tov, Yaacov. (2004). Dialectics between Stable Peace and Reconciliation (In) Bar-Siman-Tov, Yaacov (Ed.). *From Conflict Resolution to Reconciliation*. New York: Oxford University Press.
- Bar-Tal, Daniel & Bennink, Gemma H. (2014). The Nature of Reconciliation as an Outcome and as a Process (In) Bar-Siman-Tov, Yaacov (Ed.). *From Conflict Resolution to Reconciliation*. New York: Oxford University Press.
- Bräuchler, Birgit. (2009). Cultural Solutions to Religious Conflicts? The Revival of Tradition in the Moluccas, Eastern Indonesia. *Asian Journal of Social Science* 37(2009), 872–891. DOI: <http://dx.doi.org/10.1163/156848409X12526657425226>
- Hasudungan, Anju Nofarof; Sariyatun; & Joebagio, Hermanu. (2020). Pengarusutamaan Pendidikan Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal Pela Gandong Pasca Rekonsiliasi Konflik Ambon di Sekolah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17 (2), 409-430. DOI: <http://doi.org/10.31291/jlk.v17i2.664>.
- Indrawan, Jerry & Putri, Ananda Tania. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4 (1), 12-26. Doi: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>.

- Ismail, Arifuddin. (2017). Membedah Kerukunan Pasca Konflik di Kota Ambon. *Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Jurnal "Al-Qalam,"* 23 (1), 1-14.
- La Jaali., Cangara, Hafied., & Hasrullah. (2013). Peran Pemuka Pendapat (Opinion Leader) dalam Memelihara Kedamaian di Tengah Konflik Horizontal di Desa Wayame Ambon. *Jurnal Komunikasi Kareba.* 2(3), 251-258. <https://doi.org/10.31947/kjik.v2i3.329>.
- Tidore, Burhanuddin. (2020). *Resolusi Konflik Berbasis Teologi Bakubae: Studi Konflik Ambon, 1999-2002.* (Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53256/1/BURHANUDDIN%20TIDORE%20-%20SPs.pdf>